

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan suatu negara, baik itu dalam hal yang positif maupun negatif. Kualitas generasi muda dapat sangat memengaruhi nasib sebuah negara. Jika generasi muda ini memiliki semangat untuk mendapatkan pendidikan yang baik sejak dini, itu akan memberikan dampak positif pada kemajuan negara tersebut (Rahman, 2019).

Siswa menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari generasi muda yang memiliki kontribusi penting dalam mewarisi dan melanjutkan peran kepemimpinan untuk masa depan negara. Siswa bisa dikatakan sebagai aset bagi suatu bangsa dan negara, karena mereka merupakan individu yang mendapatkan pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu. Mereka adalah generasi muda yang memiliki kapasitas intelektual dan memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam perbaikan masyarakat dan negara selama mereka menempuh pendidikan nasional (Rahayu, 2018).

Pendidikan memiliki peran kunci dalam membentuk individu yang dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial (Sisiliaudra, 2023). Pembelajaran pada abad ke-21 saling terkait dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan memiliki peran penting

dalam menyiapkan sumber daya manusia agar dapat menghadapi tuntutan kehidupan di era digital. Kehidupan saat ini sangat terkait dengan teknologi, sehingga peserta didik perlu memiliki keterampilan yang relevan dengan era digital (Rosnaeni, 2021). Dalam konteks ini, pembelajaran perlu difokuskan pada pengembangan 4 kemampuan, yakni kemampuan dasar yang diperlukan di era digital, yang meliputi kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas.

Salah satu dari keempat kemampuan tersebut adalah berpikir kritis. Kemampuan tersebut melibatkan cara individu menganalisis, menilai, mengevaluasi, dan merancang argumen yang logis dan rasional dalam pengambilan keputusan (Mardhiyah, dkk. 2021). Melalui kemampuan berpikir kritis, seseorang dapat merespon dengan terbuka terhadap berbagai situasi dan sudut pandang. Sikap kritis muncul dari kemampuan berpikir kritis yang lahir dari pengetahuan, sikap, keterampilan, komitmen, kepercayaan diri dan kecakapan (Alfiandra, dkk. 2018).

Kemampuan berpikir kritis diperlukan karena individu yang memiliki kemampuan ini cenderung mampu menggunakan logika dalam menghadapi masalah serta mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan informasi yang tersedia (Susilawati, dkk. 2020). Lebih lagi hal tersebut merupakan bentuk keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis secara kritis.

Selain itu, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung dengan cepat dan memungkinkan akses ke informasi yang luas

dari berbagai sumber diseluruh dunia, kemampuan siswa untuk berpikir kritis menjadi sangat penting. Hal ini menuntut setiap individu memiliki keterampilan untuk mengolah, mengevaluasi, dan menyaring informasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan global yang ada. Siswa akan mengalami kesulitan dalam membuat keputusan yang cerdas jika kemampuan berpikir kritis mereka kurang (Nuryanti, dkk. 2018). Hal tersebut terjadi karena ketika mereka harus membuat pilihan, mereka tidak selalu mempertimbangkan faktor-faktor dengan cara yang rasional.

Kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia masih rendah. Dari total 81 negara yang berpartisipasi dalam survei PISA tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-71. Siswa di uji dalam kemampuan *Higher Order Thinking Skill* (HOTS), yang mengharuskan mereka untuk menggunakan pemikiran kritis saat menjawab survei PISA.

Wulandari dan Warmi (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki keterbatasan dalam berpikir kritis, hanya sebagian kecil dari mereka yang mampu berpikir kritis dengan tingkat yang tinggi, sementara mayoritas siswa berada pada tingkat kemampuan berpikir kritis yang sedang. Hal tersebut menunjukkan pentingnya upaya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis di kalangan siswa untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan intelektual yang lebih besar di masa depan. Penelitian yang dilakukan Indriarni (2020), juga menyajikan hasil senada, yaitu terjadi di SMA Negeri Jakarta, di kelas XII,

sekitar 60% siswa tidak memiliki kemampuan berpikir kritis yang cukup dalam menyelesaikan masalah kontekstual.

Hal serupa juga terjadi di SMA 45 Jakarta, pada assesmen akhir semester tahun ajaran 2023-2024, terdapat sebuah hasil penilaian assesmen akhir semester (AAS) pada mata pelajaran, terutama Pendidikan Pancasila dan mata pelajaran lainnya. Rata-rata siswa di SMA 45 Jakarta kesulitan menjawab soal-soal yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) yang melibatkan literasi dan numerasi. Kendala ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan siswa dalam berpikir kritis, seperti kemampuan menganalisis, membuat argumen, menyimpulkan dan memberikan solusi..

Ada beberapa hal yang menghalangi upaya mengajarkan siswa berpikir kritis. Salah satu di antaranya adalah pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila yang masih sangat terpusat pada peran guru, yang mengakibatkan siswa menjadi kurang aktif dan kurang mendorong pengembangan kemampuan berpikir mereka sendiri. Hasilnya adalah guru memberikan pengajaran secara monoton dan kurang memperhatikan kebutuhan siswa. Hal ini mengakibatkan siswa menjadi tidak terbiasa dalam menganalisis masalah (Tarigan, 2023).

Selain itu, guru masih menerapkan model pembelajaran yang fokus pada penyampaian pengetahuan tanpa memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, sehingga dapat membuat siswa lebih cenderung melakukan kesalahan dalam penalaran (Khaeruddin, dkk. 2018). Kurangnya kemampuan berpikir kritis pada

seseorang dapat memiliki dampak signifikan pada kemampuannya untuk mengatasi tantangan dan mengambil keputusan yang tepat, baik di lingkungan sekolah, dalam aspek kehidupan pribadi mereka, maupun dalam karier mereka di masa mendatang (Syarifah & Sumardi, 2015).

Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam model pembelajaran sebagai respon terhadap tantangan yang muncul akibat rendahnya kemampuan berpikir kritis di kalangan siswa. Pemilihan model pembelajaran yang tidak cocok bisa menghambat kemampuan berpikir siswa dalam menghadapi materi pelajaran (Triumiana & Sudarsono, 2017).

Salah satu model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan yaitu *controversial public issues* (CPI). *Controversial public issues* mengacu pada hal-hal yang mudah diterima oleh sebagian orang atau kelompok, tetapi seringkali ditolak oleh orang atau kelompok lain (Komalasari, 2010). Dengan kata lain, model pembelajaran ini memperkenalkan isu-isu yang menciptakan perbedaan pendapat yang beragam, mendorong peserta didik untuk menggunakan keterampilan berpikir (Faridhoh & Yani, 2018).

Beberapa peneliti lain telah menyelidiki dan menggunakan model pembelajaran *controversial public issues* sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian Rahmayanti (2023), tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif menggunakan model pembelajaran *controversial public issues* dalam mata pelajaran ekonomi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam penelitian ini, diperoleh hasil model

pembelajaran *controversial public issues* dapat meningkatkan dimensi *critical thinking skill* yang terkandung pada mata pelajaran ekonomi.

Hal serupa dilakukan oleh Alfiandra, dkk. (2018) dengan tujuan untuk menunjukkan seberapa efektif model *controversial public issues* dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam penelitian tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa Implementasi model pembelajaran kontroversial dapat memperkuat kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui model ini, mahasiswa menjadi lebih terampil dalam mengenali, mendefinisikan, meneliti, menilai, dan menggabungkan berbagai solusi untuk merumuskan jawaban yang menyeluruh atas suatu masalah (Alfiandra, dkk. 2018).

Dalam penelitian yang akan dijalankan, fokus utama adalah pada pembelajaran Pendidikan Pancasila. Pelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Hal ini sangat penting untuk membangun dan mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik yang menghargai demokrasi dan dapat berpikir kritis. Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam membangun individu menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Permendiknas No. 22 Tahun 2006, tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang direncanakan akan menerapkan model pembelajaran *controversial public issue* di SMA Negeri 45 Jakarta pada pembelajaran Pendidikan Pancasila. Hal tersebut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di kelas XI SMA Negeri 45 Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran tidak memberikan kesempatan terhadap siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir.
2. Penerapan model pembelajaran terpusat ada peran guru dan kurang memperhatikan kebutuhan siswa, sehingga siswa kurang mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
3. Dibutuhkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

C. Pembatasan Masalah

Dalam konteks identifikasi masalah, penelitian yang akan dilakukan akan mengalami beberapa pembatasan. Salah satu pembatasan utama dalam penelitian ini akan terfokus pada penggunaan model pembelajaran *controversial public issues*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari penerapan model pembelajaran *controversial public issues* terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, penelitian ini juga akan

membatasi diri dalam lingkup mata pelajaran yang akan di teliti, yaitu Pendidikan Pancasila dan lingkup buku bahan ajar kelas XI pada elemen NKRI. Penelitian ini akan dilakukan pada kelas XI di SMA Negeri 45 di Jakarta.

D. Perumusan Masalah

Mengacu pada pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah, “Apakah terdapat pengaruh dari model pembelajaran *controversial public issues* terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran Pendidikan Pancasila?”

E. Manfaat Penelitian

Secara garis besar hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi guru dan sekolah, informasi ini dapat memberikan panduan mengenai model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam konteks pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila.
2. Dari perspektif siswa, ini berarti bahwa siswa memiliki peluang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis selama proses belajar, sehingga siswa dapat lebih baik dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep yang mereka pelajari dalam mata pelajaran Pancasila.
3. Bagi peneliti di masa mendatang, temuan ini dapat menjadi landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan meningkatkan kualitas

pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mengembangkan model pembelajaran yang lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

